

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Banjarbaru sevara penuh sudah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPE) mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Untuk tahap perencanaan, aplikasi menggunakan SiRUP, LPSE, dan e-Katalog yang telah dikembangkan oleh LKPP.

Saat ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjarbaru telah memiliki aplikasi berbasis web namun masih terbatas pada penayangan berita dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, laporan ini menggunakan data – data dari sistem informasi SPSE dari LKPP yang diolah menjadi informasi dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Laporan yang disampaikan juga dapat menunjukkan akuntabilitas berupa proses kerja khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan sebagai sarana untuk perbaikan atas hasil yang dicapai setiap tahunnya.

## B. LAPORAN PEGGUNAAN APLIKASI

## b.1. Penggunaan Aplikasi Pengadaan secara Penuh

Kota Banjarbaru telah sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Aplikasi SiRUP digunakan dalam tahap perencanaan pengadaan. Aplikasi LPSE digunakan dalam tahapan persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima. Aplikasi e-Katalog dari LKPP digunakan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa melalui e-Purchasing. Aplikasi SIKaP digunakan untuk monitoring pelaku usaha.

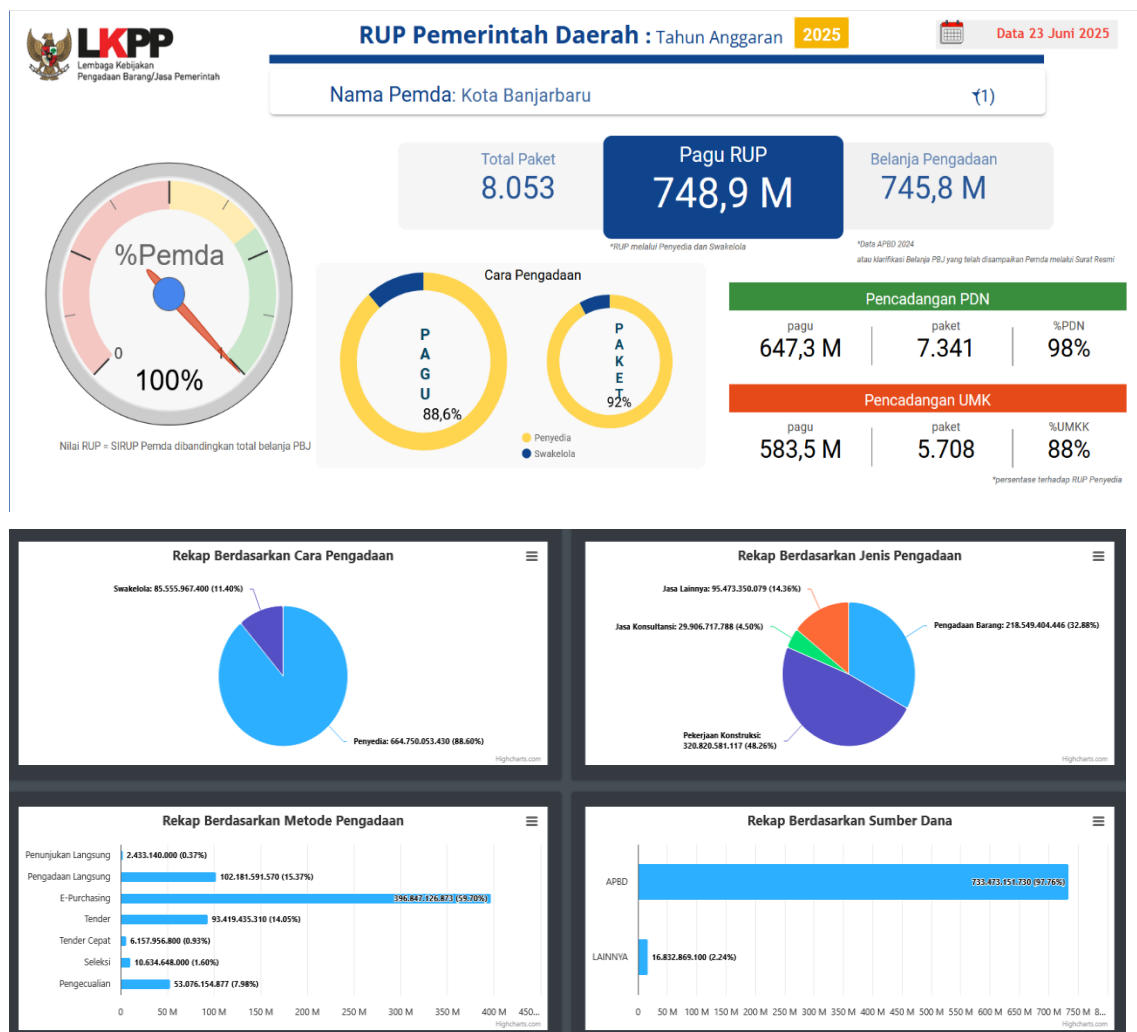
## b.2. Perencanaan

No	KUPD	Pkt	Page	Kpg	Page	Pkt	Page	Rkp	Page	Total Pkt	Total Page
1	Kota Banjarbaru	7432	664.750	643	85.555	0	0	0	8.675	730.396	

Pengumuman paket pekerjaan di Kota Banjarbaru menggunakan aplikasi SiRUP. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa bahwa hasil akhir perencanaan berupa RUP (Rencana Umum Pengadaan) harus diumumkan pada aplikasi tersebut.

Saat ini proses perencanaan pengadaan berupa penyusunan dokumen mulai dari identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran masih belum menggunakan sistem informasi. Setelah hasil akhir perencanaan berupa RUP tersusun, kemudian diinput ke dalam aplikasi SiRUP.

Pada tahun 2025, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjarbaru melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian SiRUP yang melibatkan seluruh admin SiRUP. Hasil dari kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2025 pengisian SiRUP telah mencapai 100%. Angka tersebut berdasarkan besaran nilai pagu belanja Kota Banjarbaru sebesar Rp. 744,6 milyar.



Dari gambar diatas diketahui bahwa total paket di SiRUP tercatat sejumlah 8.089 dengan distribusi 92,05% paket pengadaan melalui penyedia dan sisanya melalui swakelola dengan total paket sebanyak 643 dan distribusi 7,95%. Pencadangan paket untuk UMK mencapai 88% atau sebanyak 5.708 paket dan paket untuk PDN sejumlah 7.341 paket dengan persentase 98%.

Dari sisi pagu paket per jenis pengadaan, Jasa Konstruksi merupakan paket dengan nilai tertinggi yaitu lebih dari 300 milyar disusul Pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi.

Informasi pagu dan paket per metode pengadaan bahwa tahun 2025 metode pengadaan terbanyak adalah e-Purchasing disusul pengadaan langsung, tender, pengecualian, seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung.

Informasi – informasi tersebut dapat dipergunakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk merencanakan pelaksanaan pemilihan penyedia pada tahun 2025.

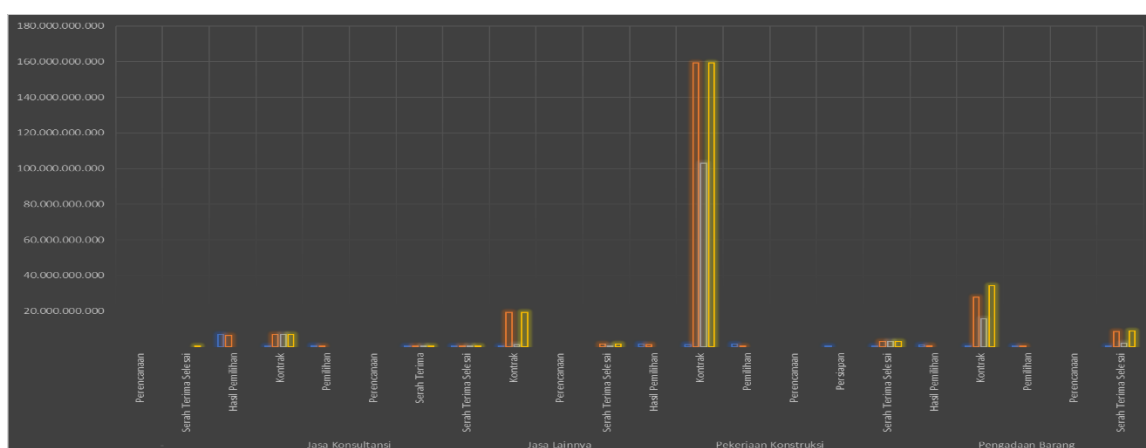
### b.3. Persiapan

Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa di Kota Banjarbaru menggunakan aplikasi SPSE. Tahapan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan masuk ke aplikasi <https://lpse.banjarbarukota.go.id/>. Tahapan persiapan pemilihan untuk paket tender/seleksi/non tender telah menggunakan SPSE.

Pada tahapan ini PPK sudah harus mempersiapkan dokumen – dokumen Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri, dan Rancangan Kontrak. Dokumen – dokumen tersebut disusun menggunakan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka dan kemudian diupload ke SPSE dalam bentuk pdf.

### b.4. Pemilihan

Pada proses pemilihan penyedia, Kota Banjarbaru menggunakan aplikasi SPSE sebagaimana pada tahap persiapan. Proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dengan terlebih dahulu masuk ke aplikasi SPSE. Saat ini Kota Banjarbaru terus mendorong penggunaan SPSE untuk pemilihan penyedia paket non tender di seluruh SKPD di Kota Banjarbaru.



Berdasarkan data yang diperoleh melalui SPSE, dapat dianalisis seberapa baik proses pemilihan penyedia di Kota Banjarbaru selama triwulan II periode April s/d Juni 2025. Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa proses tahapan pengadaan barang dan jasa telah berjalan untuk semua jenis pengadaan dengan rincian nilai pagu yang dikontrakkan sebesar Rp. 233.631.274.267, nilai realisasi UMKM sebesar Rp. 132.548.165.493, nilai realisasi PDN sebesar Rp. 235.858.546.439, sehingga didapat nilai efesiensi sebesar Rp. 13.680.401.028. Kondisi ini diharapkan terus membaik kedepannya.

#### **b.5. Kontrak**

Proses kontrak dilakukan oleh PPK dengan menggunakan aplikasi LPSE setelah proses pemilihan penyedia selesai dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Setelah proses pemilihan selesai, laporan hasil pemilihan disampaikan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan kepada PPK dan kemudian ditindaklanjuti dengan reviu dan penetapan SPPBJ. Kontrak ditandatangani dan data – data kontrak kemudian diupload di SPSE oleh PPK.

Kendala utama dalam proses manajemen kontrak ini adalah jarang PPK yang mengisi informasi SPPBJ, dan kontrak di SPSE. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa meminta data – data tersebut secara manual langsung kepada PPK.

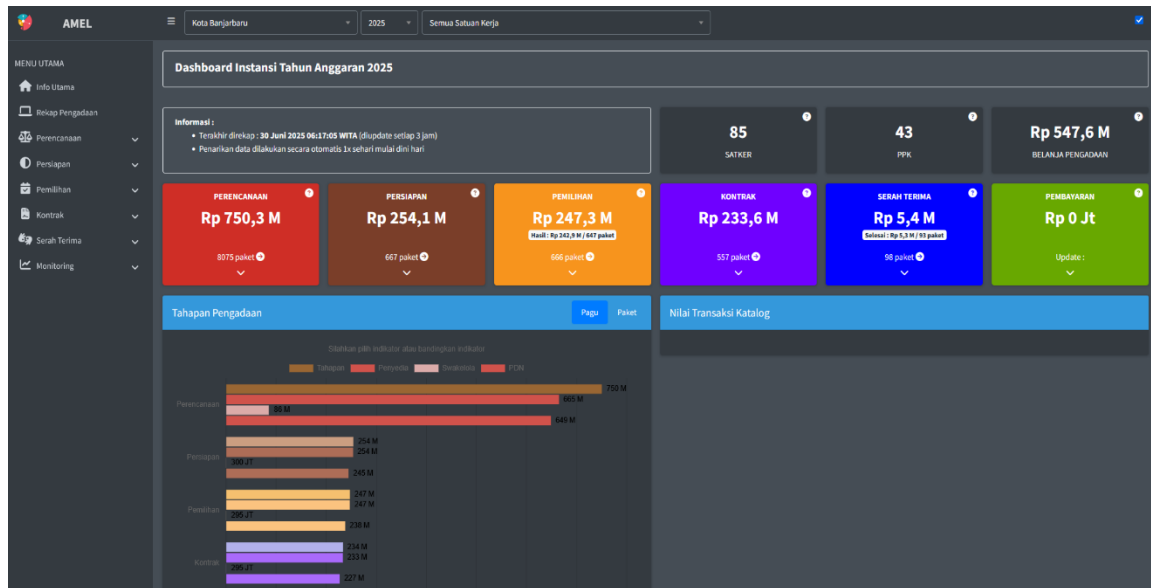
Setelah kontrak ditandatangani, proses selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak oleh penyedia, dan PPK melakukan manajemen kontrak dengan melakukan pembayaran dan datanya dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE.

#### **b.6. Serah Terima**

Proses serah terima pekerjaan dilakukan menggunakan aplikasi LPSE oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses ini merupakan bagian dari proses manajemen kontrak yang dilakukan oleh PPK. Pada tahapan ini, PPK mengadakan rapat dengan penyedia untuk serah terima. Pada Tahapan ini pula dilakukan penilaian penyedia yang hasilnya diinput ke dalam aplikasi SiKaP melalui akun PPK di LPSE. Pada tahapan serah terima pekerjaan ini PPK juga melakukan penilaian kinerja penyedia. Hasil penilaian ini kemudian diinput ke dalam aplikasi SiKaP oleh PPK melalui SPSE berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021.

## C. MONITORING

Tahapan monitoring atas seluruh tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi AMEL pada SPSE.



### c.1. Monitoring Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, terdapat 7.446 paket penyedia dengan total pagu sebesar Rp. 664.750.053.430 dan 643 paket swakelola dengan total pagu sebesar Rp. 85.555.967.400 yang telah diumumkan. Paket penyedia menduduki pagu paling banyak yaitu 92,05%.

Dalam pengadaan melalui penyedia, e-Purchasing merupakan metode pengadaan dengan pagu paling banyak sebesar 59,70%. Pagu untuk pengadaan langsung, tender, pengecualian, seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung menduduki urutan selanjutnya dengan persentase berturut – turut: 15,37%, 14,05%, 7,98%, 1,60%, 0,93% dan 0,37%.

Pengadaan dengan metode e\_Purchasing menghabiskan pagu paling banyak, sehingga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat memberikan perhatian lebih terhadap metode pengadaan tersebut. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan, khususnya PPK dalam melakukan perencanaan untuk pengadaan secara e-Purchasing.

### c.2. Monitoring Persiapan

Paket yang sdh masuk tahap persiapan berjumlah 661 paket dengan pagu sebesar Rp. 254.072.220.804.

### c.3. Monitoring Pemilihan

Paket yang masuk tahap pemilihan penyedia berjumlah 660 paket dengan total pagu hps sebesar Rp. 246.961.675.295.

**c.4. Monitoring Kontrak**

Paket yang masuk dalam tahap kontrak berjumlah 551 paket dengan pagu total sebesar Rp. 233.631.274.267. Nilai kontrak tertinggi adalah paket Belanja Modal Bangunan Kesehatan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Farmalkes) menggunakan metode e-Tender dengan jenis pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Kesehatan senilai Rp. 15.376.797.000. Kemungkinan besar data kontrak bisa berjumlah lebih banyak, namun karena banyak PPK yang tidak menginput data kontrak di aplikasi SPSE maka paket pengadaan tersebut tidak tercatat dalam monitoring kontrak di aplikasi AMEL. Masalah ini sudah coba diselesaikan dengan membuat surat edaran pengisian data kontrak oleh PPK. Namun hasilnya belum cukup efektif. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kepada PPK yang membutuhkan.

**c.5 Monitoring Serah Terima**

Data paket yang telah diserahkan terimakan adalah 94 paket dengan total pagu sebesar Rp. 5.420.178.062. Paket tersebut merupakan pengadaan dengan metode e-Purchasing, pengadaan langsung dan swakelola. Belum ada data paket pengadaan dengan metode tender, dikarenakan proses pemilihan masih berlangsung.


## BAB II

### PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Banjarbaru Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan data yang dihimpun dari bulan Januari hingga Maret. Pada penyusunan laporan triwulan berikutnya akan selalu dilakukan pengkinian data dan informasi maupun kedalaman analisa dari berbagai aspek.

Semoga laporan Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Banjarbaru Triwulan II Tahun 2025 dapat memberikan manfaat khususnya Bagian Pengadaan barang dan Jasa dan secara umum untuk unit kerja dan para pengambil kebijakan untuk dijadikan *input* dalam penyusunan kebijakan pembangunan di periode berikutnya, sehingga program-kegiatan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum pada dokumen perencanaan.

Banjarbaru, Juli 2025  
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

  
**Hj. Renyta Setyawati, SP., MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711010 199803 2 009